



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

---

Tahun Sidang : 2019-2020  
Masa Persidangan : I  
Rapat Ke : 18  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Senin, 16 September 2019  
Waktu : Pukul 10.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1  
Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270  
Acara : Pembahasan Penyesuaian RKA K/L Tahun 2020 Sesuai Hasil  
Pembahasan Badan Anggaran.  
Ketua Rapat : **DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si,**  
Sekretaris Rapat : Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.  
Hadir : 1. 30 dari 46 Anggota Komisi VIII DPR RI  
2. 5 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI IZIN  
3. Menteri Agama RI, Menteri Sosial RI, Menteri PP&PA RI, dan  
Kepala BNPB.

**I. PENDAHULUAN:**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.55 WIB dan dinyatakan Terbuka Untuk Umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, DR. H.M. Ali Taher, S.H., M.Hum dengan didampingi Wakil Ketua Komisi VIII DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si, Wakil Ketua Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M. Sc dan H. Marwan Dasopang, M.Si, dan H. Iskan Qolba Lubis, M.A. sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan agenda membahas "Penyesuaian RKA K/L Tahun 2020 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI", disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat menerima Hasil Penyesuaian RKA K/L Kementerian Agama RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI, dengan Pagu Anggaran sebagai berikut:
  - a. Kementerian Agama RI sebesar Rp65.060.948.695.000,- (*enam puluh lima triliun enam puluh miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);
  - b. Kementerian Sosial RI sebesar Rp62.767.643.594.000,- (*enam puluh dua triliun tujuh ratus enam puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*);
  - c. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI sebesar Rp.273.641.802.000,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Ribu Rupiah*).
  - d. Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp.700.646.814.000,- (*Tujuh Ratus Milyar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*).
2. Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
  - a. Mendesak Kementerian Agama RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI serta Badan

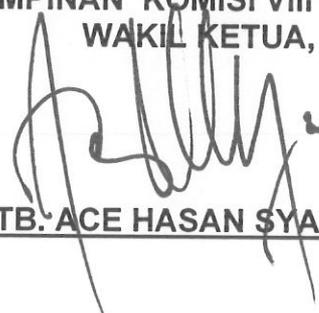
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memastikan program-program prioritas bisa terlaksana secara tepat sasaran dan akuntabel.

- b. Mendesak Kementerian Agama RI untuk memperhatikan sarana prasarana MAN IC demi peningkatan kualitas pendidikan.
- c. Mendesak Kementerian Agama RI berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan RI terkait tidak dicantumkannya label halal pada produk impor unggas dari luar negeri.
- d. Mendesak Kementerian Sosial RI untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Program Keluarga Harapan baik secara kuantitas maupun kualitas.
- e. Mendesak Kementerian Sosial RI melakukan pemutakhiran data yang terkait dengan program penerima bantuan sosial.
- f. Mendesak BNPB untuk meningkatkan program mitigasi bencana dalam rangka mencegah terjadinya bencana di daerah-daerah yang rawan bencana.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.59 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
WAKIL KETUA,**

  
**DR. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si,**